

21  
Afschrift.

Zegel f 1.50.

4/1020 Gobe 295, 16 (1)  
Dipersembahkan ke hadlirat Seri Padoeka Jang Dipertoean Besar Gouverneur Generaal dari Hindia-Nederland, jang bersemajam di Astana

B U I T E N Z O R G .

Dengan segala kerendahan dan kehormatan.

Bahwa jang bertanda tangan di bawah ini, hamba l.

Raden Hadji Mohammad Adnan, hoofdpangoeloe Landraad di Soerakarta sebagai voorzitter, dan 2. Raden Asrowardi, pangoeloe Landraad di Bojolali sebagai secretaris, dari Hoofdbestuur Perhimpunan Pangoeloe Dan Poenggawainja di tanah Djawa dan Madoera, jang disingkatkan dengan nama P.P.D.P. dan jang telah didirikan ketika pada hari 16 Mei 1937 dan bertempat di Soerakarta;

bahwa atas nama P.P.D.P. di seloeroeh tanah Djawa dan Madoera, setelah mendengarkan oesoel-oesoel, pertimbangan-pertimbangan dan pendapatan-pendapatan dari anggauta-anggautanja dalam sidang permoesjawaratan pada hari 16 Mei 1937 jang telah laloe, demikian djoega setelah memperhatikan poela soeara-soeara dari fihak kaoem Moeslimien oemoemnja, maka P.P.D.P. terseboet laloe mengambil poetoesan, mempersembahkan sepoetjoek soerat permohonan ini ke hadlirat Pemerintah Agoeng Hindia-Nederland sebagai terseboet di bawah ini:

I. HAL PEROEBAHAN RAAD AGAMA JANG TELAH DILAKOEKAN MOELAI 1 APRIL 1937, SEPERTI JANG TERMAKTOEB DALAM STBLD. 1937 No.116, TENTANG OEROESAN PERKARA WARISAN KAOEM MOESLIMIEN DIPERIKSA OLEH PENGADILAN LANDRAAD TIDA DENGAN PERANTARAANNJA RAAD AGAMA, HANJA MEMAKAI ATOERAN ATAU POETOESAN ADATRECHT OEMOEMNJA; maka sidang permoesjawaratan P.P.D.P. telah menimbang dan memoetoeskan:

bahwa peroebahan ini P.P.D.P. ada keberatan, sekalipoen Adatrecht itoe boleh djoega di sesoeatoe tempat memakai poetoesan menoeroet Hoekoem Prail, karena hoekoem jang hidoep di antara ra'jat Moeslimien di itoe tempat 100% Islamistisch-recht; adapoen sebabnja keberatan itoe:

a)

- a). Adatrecht itoe tidak tetap, di sesoeatoe masa dapat beroebah menoeroet daja-daja jang berpengaruh besar di antara ra'jat, sedang Hoekoem Agama Islam tetap selama-lamanja, dan tiada akan menjalahi Koran dan Hadits, dan tida boleh dioebah lagi menoeroet peroebahan adat atau lain-lain peratoeran apapoen djoega, jang tiada bersetoedjoe dengan Koran dan Hadits, dan jang soedah tetap mendjadi hoekoem sjara' atau sjareatnja Agama Islam.
- b) Orang-orang Islam jang menerima poetoesan Adatrecht dari hal warisan itoe, pada hal tidak menoeroet Hoekoem Ilmoe Prail, itoe boleh dipandang mereka tadi semata-mata memboeang Agama-nja, karena peratoerannja stau hoekoem-hoekoemnja soedah tida diindahkän lagi, meskipoen hanja sebagai sadja.
- c) Dengan adanja itoe Stbld. 1937 No.116, sifatnja Raad Agama tida beroepa mendapat perbaikan, meski diberinja keroegian 75% atau lebih dari djoemlah pengasilan Raad Agama di seloeroeh tanah Djawa dan Madoera dalam tahoen 1934-1935 sekalipoen djoea, tetapi Raad Agama itoe seolah-olah tida ada ertinja sama sekali kedoedoekannja sebagai Hakim Agama Islam, jang soeda semistinja mengoeroes segala hoekoem2 Agama Islam, oentoek ra'jat Hindia-Nederland jang beragama Islam, jang sama mengadoekan perkara perkawinan, warisan d.l.l.s. dengan poetoesan menoeroet Hoekoem Sjar'ie dari Agama Islam, hal mana djikalau hak-haknja Raad Agama itoe dipotong atau dikoerangi sebagai-an sadja, maka sifatnja Raad Agama itoe seolah-olah seperti ditjaboet Rohnja atau Njawanja.
- d) Mengingat kedoedoekannja Pangoeloe2 di loear dan di dalam Raad Agama telah terkenal dipandang oleh oemoemnja ra'jat sebagai Kepala Agama Islam, maka mereka itoe (Pangoeloe2) tidak dapat dipandang atau tidak mempoenjaj perhoeboengan satoe apa dengan itoe Stbld. 1937 No.116 tadi, oleh karena itoe Stbld. mengenai soeal Agama kita Islam djoega.
- e) Hal membagai waris menoeroet poetoesan Hoekoem Ilmoe Prail, seperti jang soedah berlakoe ratoesan tahoen di ini Hindia-Nederland oentoek ra'jat jang beragama Islam, itoe semata-mata termasuk dalam Hoekoem Sjar'ie dari Agama kita Islam, djadi kalau dioebah memakai Adatrecht, ini bernama mengoebah Agama djoega.

Bahwa mengingat pendiriannja Pemerintah Agoeng Hindia Nederland itoe neutraal sikapnja terhadap oeroesan Agama, demiki an djoega tidak akan mentjampoerkan diri dalam oeroesan Sjara' Agama Islam, atau tidak akan mengoebah-oebah Agama kita Islam, maka P.P.D.P. memohon dengan hormat dan sangat, hal perkara warisan orang2 Islam, soepaja dikembalikan seperti dahoeloe kala, ja'ni diperiksa oleh Raad Agama dengan memakai poetoesan Hoekoem Ilmoe Prail.

II. MENOEROET STBLD. 1937 No.48, WAKIL PANGOELOE JANG DOEDOEK DI MANA ZITTING PENGADILAN LANDRAAD SEBAGAI ADVISEUR, DJIKALAU IA ITOE SOEDAH MENDAPAT GADJIH DARI ZELFBESTUUR, IA TIDAK DIBERIJNJA ZITTINGSGELD; tentang atoeran ini sidang permoesjawaratan P.P.D.P. menimbang dan memoetoeskan:

- a). Mendjadi adviseur tiada moedah.
- b). Gadjihnja wakil Pangoeloe jang dimaksoedkan Stbld. terseboet, terlaloe ketjil, sedang mereka itoe pada tiap2 zitting di Landraad moelai pagi sehingga lepas siang, meninggalkan roemah tangga dan haroes mewakilkan pekerdjaannja sendiri pada kawannja dengan peritoengan, lagi poela djalannja ke kantor tentoe memakai pakaian jang pantas dan kadang2 kalau kabetoelan tiada berkendaraan fiets tentoe naik kendaraan sewan.

Dari itoe djikalau wakil2 pangoeloe terseboet masih perloe dipakai, P.P.D.P. memohon soepaja mereka itoe sama mendapat zittingsgeld lagi.

III. PERKARA SOEMPAH ATAU SEKSI PALSOE DI DEPAN MADJELIS RAAD AGAMA, SEPERTI JANG SOEDAH KEDJADIAN DI KLATEN. OEROESAN HAL INI MENOEROET SOERAT DARI PADOEKA TOEAN PROCUREUR GENERAAL TERTANDA 16 OCTOBER 1936 NO.2308, PERKARA ITOE DI-DEPONEER (TIDAK DAPAT DIPOENTOET ATAU DIBIKIN PERKARA), SEBAB BELOEM ADA ATOERANNJA.

Sidang permoesjawaratan P.P.D.P. telah menimbang dan memoetoeskan:

bahwa hal jang demikian itoe tentoe laloe menerbitkan perasaan di antara orang banjak, bahwa Raad Agama tidak ada haranja, dan dengan hal jang demikian itoe akan boleh djadi djoega di belakang hari menoemboehkan beberapa oeroesan atau perkara jang tiada baik, jang tiada diharapkan oleh Mahkamat.

Dari sebab itoe maka P.P.D.P. memohon dengan sangat ke hadlirat

hadlirat Pemerintah Hindia-Nederland, soepaja Raad Agama itoe diperbaiki atau disempoernakan kedoedoekannja sebagai Hakim Agama Islam, dengan diberinja hak jang sama seperti lain2 badan Pengadilan jang berada di ini Hindia-Nederland, sekadar oentoe menghindarkan segala roepa halangan dan hal ichwal jang dapat membikin rintangan dalam hal memperoleh kebaikan dan keberesannja semoea perkara.

IV. HAL GADJAH PANGOELOE MENCEROET H.B.B.L.1934-D, DIOEBAH MEN-DJADI TOELAGE, TIDAK TERMASOEK PADA BILANGAN BEZOLDIGING LAGI.

Sidang permoesjawaratan P.P.D.P. telah menimbang dan me-moetoeskan:

bahwa atoeran ini mendjadikan keberatan sekalian Pangoe-loe2, sebab golongan Pangoeloe2 jang kedoedoekannja sebagai amb-tenaar djoega, bakal tidak bisa mendapat hak pensioen, kindertoe-lage boeat anak-anaknja jang sama sekolah d.l.l.s. lagi.

Dari itoe maka P.P.D.P. mohon dengan hormat lagi sangat, hendaklah Pemerintah Agoeng Hindia-Nederland memperbaiki nasib kita golongan Pangoeloe2 dengan djalan:

gadjah Pangoeloe2 tiada didjadikan toelage, tetapi soepaja dikem-balikan mendjadi bezoldiging atau tractement lagi seperti dahoe-loe, dengan herziening jang lebih memoeaskan dari pada jang soe-dah, soepaja setimbang dengan kedoedoekannja sebagai Hakim dan Ke-pala Agama.

Bahwa permohonan jang terseboet di atas itoe semoea, P.P.D.P. mengharap moedah-moedahan Pemerintah Agoeng Hindia-Nederland dapat mengaboelkan semoea permohonan kita itoe tadi, sehingga ber-hasil mendapat poetoesan jang memoeaskan dan menjenangkan oentoe kita golongan P.P.D.P. dan ra'jat Islam di seloeroeh Hindia-Nederland semoea adanja.

Bahwasanja afschrift dari soerat permohonan ini dikirim djoega ke hadapan Padoeka Toean-toean:

Gouverneur di Soerakarta, Directeur dari Departement van Jus-titie dan Adviseur voor Inlandsche Zaken.

Soerakarta pada hari 11 September 1937.

Atas nama H.B. P.P.D.P. di Soerakarta,  
tertanda:

1. Voorzitter: (w.g.) Mohamad Adnan
2. Secretaris: (w.g.) Asrowardi.

Voor eensluidend afschrift.

De Secretaris,  
Asrowardi.

6

Verzoek van de commissie van bijstand voor het adatrecht om nadere inlichtingen omtrent godsdienstige rechtspraak en berechting van familie- en erfrechtzaken in de Buitengewesten.

I. De Mohammedaansche godsdienstige rechtspraak (van pengoeloe, <sup>1</sup>gadli, hakim, "priesterraad", raad agama, raad oelama, sjarat, sidang djoemaät enz. enz.)

In het bijzonder is het de commissie te doen om

- A. gewestelijke of andere plaatselijke (officieele of niet-officieele) regelingen betreffende die godsdienstige rechtspraak.
- B. afschriften van vonnissen en andere processtukken van godsdienstige rechters en liefst:
  - 1. uit verschillende streken van het gebied (uiteenliggende streken; van streken met zelfbestuur en die met rechtstreeks <sup>ch</sup>bestuur).
  - 2. van godsdienstige rechtspraak ingevoegd op Gouvernements rechtspraak en ingevoegd op inheemsche rechtspraak.
  - 3. betreffende verschillende onderwerpen (bijvoorbeeld echtscheiding, boedelverdeeling, vrome stichtingen enz.)
  - 4. betreffende verschillende bevolkingsgroepen (indonesiers, arabieren).
- C. Mededeelingen nopens samenstelling, competentie en procesrecht der godsdienstige rechters; zoo mogelijk over ontstaan en ouderdom van die rechtbanken of gerechten en over de vraag of de godsdienstige rechters ook rechtspreken over Mohammedaansche vreemde Oosterlingen (attributie) dan wel of die bevolkingsgroep een eigen rechter heeft.

II. De berechting van familie- en erfrechtzaken.

Ook ten deze gaat het verzoek der commissie om:

- A. eventueel bestaande regelingen omtrent de berechting van familie- en erfrechtzaken, geen betrekking hebbende op de onder I bedoelde godsdienstige rechtspraak.

7

B. afschriften van vonnissen van wereldlijke rechters in familie- en erfrechtzaken en liefst.

1. uit verschillende stroken van het gebied (uiteenliggende streken; uit zelfbesturen en rechtstreeks bestuurd gebied).
2. nopens verschillende onderwerpen (bijvoorbeeld echtscheiding, adoptie, toescheiding van goederen).
3. betreffende onderscheiden op dit punt veelal verschillende groepen der bevolking (Mohammedanen, Christenen, heidenen; vreemde Oosterlingen, Indonesiers).

C. Mededeelingen over bijzonderheden bij wereldlijke rechtspraak in familie- en erfrechtzaken (d.w. of daarbij van adviseurs gebruik wordt gemaakt enz.).

D. Mededeeling of het uitspreken der voorwaardelijke verstooting bij of na het huwelijk gebruikelijk is dan wel somtijds voorkomt en hoe de daarbij gebezigde omschrijvingsformule woordelijk luidt.

De enkel op de praktijk berustende afdoening van zaken door godsdienstbeambten heeft evenzeer de belangstelling der commissie als de op officiële regeling berustende godsdienstige rechtspraak.

Voor al een aantal en een verscheidenheid van vonnissen kunnen veel tot het verlangde inzicht bijdragen en zijn dus bijzonder welkom.

De commissie van bijstand  
voor het adatrecht,

V. d. d. 2.

*(Handwritten signature)*

Voorzitter.

*(Handwritten signature)*

Secretaris.

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*